

SEMINAR INTERNASIONAL KE 11 DINAMIKA POLITIK LOKAL DI INDONESIA : “ADA APA DENGAN 10 TAHUN OTONOMI DAERAH ?”

Untuk pertamakalinya peraturan formal tentang pemekaran daerah atau otonomi daerah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 23 Juli 1903. Undang-undang Otonomi Daerah yang waktu itu dikenal sebagai *Decentralisatie Wet 1903* sebenarnya hanya merupakan amandemen parsial terhadap *Regeringsreglement 1854* (RR 1854). Tiga pasal tambahan yaitu pasal 68a, 68b, dan 68c menunjukkan empat hal yaitu: (1) Bahwa Hindia Belanda akan dibagi ke dalam satuan-satuan daerah; (2) Pemerintahan daerah tersebut akan dilaksanakan oleh pejabat tinggi (*hoofdamtenaren*); (3) Gubernur jenderal sebagai penguasa dari pejabat tersebut, dan (4) Kekuasaan sipil adalah kekuasaan tertinggi di daerah (**Wignjosoebroto, 2004**). Sebenarnya Undang-undang ini selain bermaksud agar ada pemerintahan lokal yang dapat mandiri juga dimaksudkan agar tetap ada kooptasi pemerintah pusat terhadap rakyat di daerah.

Pada masa Pemerintahan Penjajahan Jepang yang lebih bersifat Fasis, maka usaha untuk memberi kebebasan kepada daerah ditiadakan dan sistem yang dikembangkan menjadi sangat sentralistis dengan adanya usaha pemerintah pusat untuk mengkooptasi dan mendominasi kekuasaan di aras lokal. Demikian pula pada masa Pemerintahan Soekarno dan Orde Baru yang juga mengindikasikan adanya sentralisasi kekuasaan, proses pemekaran daerah sangat “dihambat” dan dipertimbangkan secara sangat ketat dan lama. Usaha untuk mengkooptasi dan mendominasi kekuasaan lokal oleh pemerintah pusat terus berlanjut. Pada masa inilah mulai muncul ketidakpuasan daerah (regional) terhadap dominasi kekuasaan pusat. Ketidakpuasan itu diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perlawanan yang bersifat halus sampai perlawanan yang bersifat penuh dengan kekerasan. Bentuk ketidakpuasan yang bersifat penuh kekerasan dapat dilihat dari munculnya sejumlah “pemberontakan”, seperti “Pemberontakan” Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terutama di Jawa Barat di bawah pimpinan Karto Suwiryo, “pemberontakan” PRRI di Sumatera, “Pemberontakan” Permesta di Sulawesi Utara, atau Gerakan Separatis di Aceh, Ambon, dan di Papua.

Semua perlawanan terhadap hegemoni dan dominasi kekuasaan pusat oleh daerah tersebut dipicu oleh satu hal utama yaitu adanya perlakuan yang tidak adil terhadap daerah sehingga memunculkan kemiskinan di daerah (lokal) dan menumpuknya pembangunan di aras pusat, terutama di Pulau Jawa. Rasa ketidakpuasan daerah (pinggiran) yang sudah mulai bermunculan sejak Jaman Orde Lama, Orde Baru, dan kemudian menemukan muaranya pada saat runtuhnya Rejim Orde Baru yang bersifat sentralistis. Munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), tentang Otonomi Daerah merupakan “Jalan Tol” yang resmi bagi bermunculannya Daerah Otonomi Baru (DOB), yang dikenal sebagai Pemekaran Daerah.

Ide Pemekaran Daerah sebenarnya merupakan penataan kembali daerah-daerah agar diperoleh suatu sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mendekatkan pelayanan publik ke rakyat. Ujung dari penataan ini tidak lain adalah suatu kesejahteraan rakyat yang lebih merata di semua daerah. Wujud Pemekaran Daerah bisa berbentuk penggabungan, penghapusan, ataupun pembentukan Daerah Otonomi Baru. Namun demikian hampir semua usulan daerah yang melandaskan diri pada undang-undang ini lebih merupakan suatu usaha untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB), dengan cara memecah Daerah Otonomi Lama (Induk).

Selama sepuluh tahun terakhir ini, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah pada tahun 1999 ini telah terbentuk lebih dari 205 DOB (tujuh Provinsi, 164 Kabupaten, dan 34 Kota) atau lebih dari 20 DOB/tahun. Jumlah ini nampaknya akan terus bertambah. Padahal dari jumlah tersebut 148 DOB diantaranya telah ditetapkan oleh Depdagri untuk dievaluasi. Dengan demikian pada tahun 2010 telah terbentuk 33 Provinsi, 398 Kabupaten, dan 93 Kota di Indonesia. Sekalipun sudah ada moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru namun usaha untuk membentuk Daerah Otonomi Baru nampaknya terus berjalan. Hal ini disebabkan karena ijin atau prosedur pembentukan DOB ada dua pilihan “pintu” yang bisa ditempuh lewat Departemen Dalam Negeri atau lewat DPR. Kebanyakan ijin pembentukan DOB selalu akan diloloskan oleh pintu yang kedua (DPR). Sedangkan “pintu” Depdagri selalu sulit untuk dilalui.

Pihak Depdagri selalu menggunakan alasan “semakin beratnya beban Anggaran Negara untuk mendukung kelanjutan Daerah Otonomi Baru”. Sejumlah persyaratan yang cukup berat telah diberlakukan dan diundangkan bahkan moratorium untuk menghentikan pembentukan Daerah Otonomi Baru juga sudah diundangkan, namun pembentukan Daerah Otonomi Baru terus berlanjut karena usulan masuk lewat “pintu ke dua” (DPR). Pihak DPR selalu menggunakan alasan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru merupakan aspirasi rakyat yang harus direpresentasikan dan didukung untuk diwujudkan.

Menarik untuk dikemukakan bagaimana sikap elit dan rakyat di daerah yang selama ini terpinggirkan dan diperlakukan tidak adil di dalam pembagian “kue pembangunan”. Pada umumnya mereka akan selalu berusaha untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (terlepas dari banyaknya *rent seekers*) dengan alasan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru akan meningkatkan paling tidak Dana Alokasi Umum (DAU), DAK (Dana Alokasi Khusus), kesempatan kerja sebagai pegawai negeri yang cukup banyak di daerah, munculnya elit daerah yang memegang kekuasaan (di pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan DPRD), menguatnya identitas lokal, dan pembangunan fisik yang akan lebih merata. Mereka tidak peduli dengan semakin beratnya beban Anggaran Negara. Hasil penelitian yang dilakukan Percik, di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, menunjukkan menguatnya “semangat balas dendam” kepada Pemerintah Pusat yang dianggap selama ini hanya memperhatikan wilayah pusat (Pulau Jawa), untuk menarik dana sebanyak mungkin ke daerah. Semua permasalahan diatas, selain disebabkan adanya ketidakadilan dan “semangat balas dendam” dari rakyat di daerah, juga disebabkan oleh belum jelasnya proses dan motivasi dibalik pembentukan Daerah Otonomi Baru, yang dikenal sebagai Pemekaran Daerah.

Permasalahan menjadi semakin rumit dan tidak jelas ketika kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana relasi antara pusat dan daerah sesudah ada pembentukan DOB ? Bagaimana dampak pemekaran daerah baik bagi DOB maupun Daerah Induk ? Apakah rakyat dan wilayah yang bersangkutan menjadi semakin sejahtera, apakah wilayah-wilayah perbatasan yang selama ini diabaikan menjadi semakin memperoleh perhatian, apakah ketahanan hayati di wilayah-wilayah yang selama ini menunjukkan kerentanan telah menjadi lebih baik kondisinya ? Bagaimana evaluasi terhadap diberlakukannya Daerah Otonomi Khusus seperti di Aceh dan Papua ? atau bagaimana proses penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta apakah memang mendengar suara rakyat atau justru suara elit yang lebih diperhatikan, dan masih banyak permasalahan lain yang mengikuti proses pemekaran daerah yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun.

Beberapa aspek dari Pokok Bahasan Otonomi Daerah sebenarnya sudah pernah dibahas dalam bagian dari beberapa Seminar Internasional yang pernah diadakan oleh Percik, seperti: Seminar Internasional ke Tujuh “ Ruang untuk Memperjuangkan Kepentingan Politik Lokal”, Seminar Internasional ke Delapan “ Penataan Daerah (*Territorial Reform*) dan Dinamikanya”, Seminar Internasional ke Sembilan “Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang (*space*) dalam Dinamika Politik di Indonesia dan Asia Tenggara”. Dari pokok-pokok yang pernah dibahas kita bisa belajar dan mencoba mendalami lebih jauh lagi. Walaupun demikian mengingat begitu banyaknya permasalahan menyangkut Otonomi Daerah yang telah berlangsung selama 10 tahun, maka Seminar Internasional yang ke 11 ini akan mengangkat pemahaman kita baik dari kajian teoritis maupun kajian lapangan menyangkut Tema Otonomi Daerah.

Beberapa pokok bahasan yang terkait dengan Tema seminar “10 Tahun Otonomi Daerah” ini diantaranya adalah:

1. Telaah Teoritis Relasi Pusat dan Daerah terkait dengan 10 tahun Otonomi Daerah.

Sejumlah kajian teoritis menyangkut otonomi daerah sebenarnya sudah banyak dikemukakan terutama menyangkut asal-mula dan proses pemekaran daerah. Dari semua fenomena diatas kita bisa mengambil pelajaran untuk pengembangan selanjutnya. Walaupun demikian kajian teoritis yang menyangkut kenyataan dampak yang muncul oleh adanya Otonomi Daerah baik yang dirasakan oleh negara maupun oleh rakyat nampaknya belum banyak dikemukakan. Munculnya Daerah Otonomi Baru seringkali membuka konfrontasi baik antar daerah maupun ketidak harmonisan relasi pusat dan daerah. Dengan demikian tujuan Otonomi Daerah seringkali menjadi kabur dan lebih dinikmati oleh kelompok elit dan *rent seekers* tertentu. Dengan demikian penerapan teori otonomi daerah di Indonesia di satu pihak memang belum tentu mensejahterakan rakyatnya, namun di wilayah tertentu yaitu di Daerah Otonomi Baru sebagian besar rakyatnya merasakan manfaat yang cukup signifikan. Namun demikian manfaat yang dirasakan oleh sebagian rakyat tersebut seringkali dipersoalkan, diragukan, bahkan tidak diakui. Lebih jauh lagi pada saat ini ada gerakan untuk melakukan resentralisasi kekuasaan yang ada kearah kekuasaan yang ada di aras pusat (Jakarta), baik secara formal maupun informal. Kondisi semacam ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan dikemukakan.

2. Permasalahan dan Dampak Pemekaran Daerah di Aras Pusat

Sejumlah wilayah di Indonesia sudah banyak yang melaksanakan pemekaran dan otonomi daerah, beberapa diantaranya sudah berjalan sekitar 10 tahun. Dengan demikian menarik untuk dikemukakan dampak yang muncul oleh adanya pemekaran daerah dan oleh maraknya Daerah Otonomi Baru. Dampak ini bisa dirasakan oleh pihak pusat terutama terkait dengan aspek:

a. Demokratisasi dan Kebangkrutan Pemerintahan Pusat

Maraknya pemekaran daerah nampaknya telah membawa kesulitan bagi pemerintah pusat terutama menyangkut penganggaran nagera di masa depan. Semakin banyaknya Daerah Otonomi Baru maka beban negara untuk membangun fasilitas fisik baru dan terutama menopang gaji pegawai negeri baru yang mau tidak mau akan terus menerus menjadi tanggungan negara akan menjadi semakin banyak. Selain itu proses otonomi daerah yang semula akan membawa nuansa demokratisasi di daerah nampaknya justru berjalan ke arah yang berlawanan. Munculnya rejim otoritarian baru di Daerah

- Otonomi Baru sudah mulai nampak. Bahkan demokratisasi yang mencerminkan relasi pusat dan daerah yang seharusnya lebih bersifat egaliter dan sama derajat bisa berkembang ke arah relasi yang bersifat anarkhis dan penuh kekerasan. Gambaran tentang hal ini dan bagaimana usaha yang sudah dilakukan untuk mengatasi hal ini merupakan kajian yang dapat diketengahkan.
- b. Pemanfaatan kondisi politik demi perkembangan parpol atau individu
Permasalahan munculnya Otonomi Daerah atau Daerah Otonomi Baru seringkali menjadi ajang pertarungan elit politik lokal yang saling berlomba secara kasar untuk memperoleh dukungan di dalam proses mencari kedudukan dan kekuasaan. Dengan demikian makna keberadaan suatu parpol menjadi kabur dan berubah menjadi alat elit tertentu untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan pribadi. Kondisi yang tidak menjanjikan ini dapat dijadikan pokok bahasan yang menarik.
 - c. Evaluasi kebijakan desentralisasi dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Munculnya Daerah Otonomi Baru yang berasal dari suatu wilayah yang sebenarnya tidak layak untuk mekar, baik dilihat dari segi teknis, dari sudut potensi wilayah, maupun dari potensi SDM yang ada, telah menjadi pekerjaan rumah bagi negara untuk melakukan evaluasi dan segera melakukan tindakan yang logis dan obyektif untuk mengatasinya. Namun demikian evaluasi terhadap kebijakan desentralisasi di aras pusat ini seringkali terganjal oleh adanya kepentingan pribadi atau kelompok kelompok tertentu yang mencoba mencari keuntungan. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya merupakan pokok bahasan yang menarik untuk dilakukan.
 - d. Beberapa aspek lain terkait dengan permasalahan dan dampak pemekaran daerah di aras pusat tetap dapat dilakukan pengkajian dan pemaparan dari hasil kajian tersebut.

3. Perkembangan Relasi Pusat-Daerah terkait dengan 10 tahun Otonomi Daerah

Munculnya Daerah Otonomi Baru tidak hanya menyebabkan permasalahan relasi yang tidak harmonis antar Daerah Otonomi Baru karena adanya perebutan Sumber Daya Alam atau wilayah, namun juga tidak harmonisnya relasi antara pusat (provinsi) dan daerah. Beberapa permasalahan yang seringkali muncul diantaranya adalah:

- a. Lepasnya Kontrol Pusat (Provinsi) terhadap Daerah
Adanya Daerah Otonomi Baru memungkinkan daerah tersebut mengatur dirinya sendiri tanpa memperhatikan koordinasi dan kehendak pusat (provinsi). Makna otonomi seringkali digunakan untuk mengembangkan wilayah, kelompok, ataupun pribadi sendiri tanpa memperhatikan kaitan dengan kekuasaan dan kehendak pusat. Permasalahan ini menarik untuk dibahas dan ditemukan jalan keluarnya.
- b. Tarik-menarik kepentingan antar daerah, dan tarik menarik kepentingan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Munculnya Daerah Otonomi Baru seringkali memunculkan rejim yang menghendaki keberhasilan pembangunan di daerahnya sendiri dengan melupakan kepentingan daerah tetangganya. Kerjasama antar daerah dan koordinasi oleh pusat kemudian diabaikan. Permasalahan ini menarik untuk dikaji bagaimana mengatasinya.
- c. Perkembangan Masyarakat Sipil Terkait dengan 10 Tahun Otda

- Munculnya Daerah Otonomi Baru biasanya dapat berhasil oleh adanya dukungan masyarakat sipil yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Daerah Induk atau Pusat. Namun demikian ketika Daerah Otonomi Baru terbentuk dan identitas wilayah atau kelompok sudah dapat diketengahkan maka gerakan masyarakat sipil menjadi melemah karena cita-cita masyarakat sipil yang sempit dan eksklusif dianggap telah tercapai. Kajian tentang melemahnya gerakan masyarakat sipil di Daerah Otonomi Baru dapat diketengahkan.
- d. **Permasalahan Daerah Otonomi Khusus**
Munculnya Daerah Otonomi Khusus seperti di Aceh dan Papua memang menggembirakan rakyat di wilayah yang bersangkutan, namun demikian pada jangka panjangnya makna dari Daerah Otonomi Khusus seringkali menjadi kabur. Pengalaman pemberian nama Daerah Istimewa Aceh pada masa Soekarno sebenarnya juga hanya sekedar pemberian nama Istimewa tanpa keistimewaan kekuasaan tertentu. Pengalaman tersebut bisa menjadi basis dugaan untuk meneliti dan mengkaji bagaimana perkembangan Daerah Otonomi Khusus di Papua dan Aceh.
 - e. **Permasalahan Penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta**
Gonjang-ganjing penentuan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sampai sekarang belum tuntas dengan segala dinamikanya nampaknya menjadi kajian yang juga menarik untuk diketengahkan. Siapa yang lebih berwenang menentukan status daerah beserta semua kaidah yang menyertainya ? apakah segelintir elit di pusat ataukah rakyat Yogyakarta sendiri yang harus menentukan. Bagaimana permaian elit pusat dan lokal bermain dalam penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi hal yang belum jelas.
 - f. **Pengelolaan Perpajakan di Aras Lokal**
Munculnya Daerah Otonomi Baru yang membawa konsekwensi perubahan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan juga akan mempengaruhi pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Sampai sekarang kajian tentang bagaimana kaitan antara perkembangan keuangan di wilayah tersebut dengan pengelolaan perpajakan menjadi hal yang belum jelas dan menarik untuk dikemukakan.
 - g. Beberapa aspek lain terkait dengan relasi antara pusat dan daerah dapat dijadikan pokok bahasan juga.

4. Permasalahan dan Dampak Pemekaran Daerah di Aras Lokal, Terkait dengan 10 Tahun Otonomi Daerah

Munculnya Daerah Otonomi Baru tidak hanya menimbulkan permasalahan di aras pusat dan juga permasalahan relasi pusat dan daerah, namun juga seringkali memunculkan permasalahan di aras lokal di Daerah Otonomi Baru Itu sendiri. Beberapa aspek yang dapat dibahas diantaranya adalah:

- a. **Perkembangan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat**
Tujuan akhir pembentukan Daerah Otonomi Baru, tidak hanya terwujudnya kedekatan pelayanan publik kepada masyarakat namun terwujudnya kesejahteraan rakyat di daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian di daerah lain munculnya Daerah Otonomi Baru tidak otomatis mencapai tujuan utama diatas, beberapa daerah justru terjadi yang sebaliknya. Lebih jauh lagi adanya ketidakadilan, perusakan

- lingkungan dan korupsi justru menjadi meraja lela. Mengapa hal ini bisa terjadi ? jawaban terhadap permasalahan ini menarik untuk dikaji.
- b. Perkembangan ketahanan hayati akibat 10 tahun Otda
Adanya Daerah Otonomi Baru yang disertai semangat menggebu untuk membangun daerah seringkali dibarengi dengan usaha eksploitasi sumber daya alam secara membabi buta (*over exploited*). Kerusakan lingkungan kemudian menjadi hantu yang mulai membayangi wilayah tersebut. Kerusakan lingkungan di Daerah Otonomi Baru ini pada akhirnya akan menghilangkan ketahanan hayati di wilayah tersebut. Mengapa hal tersebut dapat terjadi dan bagaimana usaha yang sudah dilakukan untuk mengatasi hal ini dapat dijadikan pokok bahasan yang menarik.
 - c. Perkembangan *social security* pasca 10 tahun Otda
Disamping hilangnya ketahanan hayati seperti terurai di atas, maka lambat laun ketahanan sosial antara penduduk di Daerah Otonomi Baru menjadi permasalahan yang semakin nyata. Kondisi ini perlu dibahas untuk memberikan gambaran tentang begitu berbahayanya dampak Daerah Otonomi Baru yang dikelola secara salah.
 - d. Konservasi Nilai Lokal
Dengan munculnya Otonomi Daerah yang semakin membuka diri terhadap dunia luar (globalisasi) maka rakyat dan budaya lokal sebenarnya juga menghadapi tantangan yang luar biasa terutama menyangkut nilai-nilai kearifan lokal yang sudah lama dimiliki dan sekarang mulai diambil alih oleh pihak luar. Konservasi yang dilakukan oleh masyarakat lokal menyangkut pelestarian nilai kearifan lokal (termasuk nilai budaya) merupakan aspek yang perlu untuk dikemukakan.
 - e. Perkembangan Politik Identitas
Munculnya Daerah Otonomi Baru biasanya akan memperkuat pembentukan identitas kelompok mayoritas di wilayah yang bersangkutan. Politik identitas bagi kelompok mayoritas ini, di dalam perjuangannya seringkali meniadakan politik identitas kelompok lain yang biasanya menjadi minoritas. Ujung-ujungnya muncullah politik diskriminasi baik terhadap kelompok (etnis) lain atau wilayah lain yang dihuni kelompok minoritas. Kondisi yang mengarah ke bentuk-bentuk ketidakadilan dan *chuviniisme* yang berlebihan dari kelompok mayoritas tertentu merupakan hal yang membahayakan sehingga perlu dikaji secara mendalam dan obyektif.
 - f. Perkembangan daerah perbatasan dan daerah terpencil akibat 10 tahun Otda
Munculnya Daerah Otonomi Baru biasanya dipicu oleh adanya ketidakadilan pusat terhadap wilayah-wilayah pinggiran, terpencil, atau wilayah-wilayah perbatasan. Munculnya Daerah Otonomi Baru diharapkan akan nada perbaikan nasib bagi rakyat dan wilayah pinggiran, terpencil, atau wilayah perbatasan. Permasalahannya belumlah jelas apa yang terjadi di wilayah tersebut sesudah otonomi berlaku di daerah tersebut. Apakah akan semakin terpuruk atau justru akan memunculkan wilayah baru yang cukup makmur dan menjadi basis kekuatan sosial politik dan sosial-ekonomi. Pokok inilah yang nampaknya dapat dijadikan salah satu bahan bahasan dalam SI Sebelas ini.
 - g. Perkembangan keamanan wilayah lokal pasca 10 tahun Otda
Munculnya Daerah Otonomi Baru yang kemudian disertai dengan pembentukan fasilitas pelayanan publik, termasuk fasilitas yang menjamin keamanan rakyatnya merupakan sesuatu yang selalu terjadi. Permasalahannya adalah apakah rakyat

- memang menjadi memiliki rasa aman atau justru keberadaan aparat keamanan dan fasilitas keamanan menjadi rakyat terancam. Kondisi ini belumlah diketahui secara pasti, dan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Oleh sebab itu maka kajian mengenai perkembangan keamanan dan rasa aman rakyat di Daerah Otonomi Baru merupakan aspek menarik untuk dikemukakan.
- h. Diluar permasalahan seperti yang sudah terurai diatas sebenarnya masih banyak pokok bahasan lain terkait dampak pemekaran daerah dan dampaknya di aras lokal.

5. Prospek Desentralisasi

Setelah 10 tahun kita melaksanakan Otonomi Daerah tentu banyak hal baik dan buruk yang bisa kita pelajari, kita ambil, dan kita buang. Refleksi tentang pembelajaran pelaksanaan Otonomi Daerah bisa menjadi bahan diskusi yang menarik untuk dipaparkan. Pelajaran apa saja yang bisa kita dapat, persoalan apa saja yang kita hadapi dan bagaimana mengatasinya? Capaian apa yang sudah diperoleh atau keuntungan apa saja yang bisa diperoleh dan bagaimana mempertahankan kondisi yang menguntungkan tersebut ? Faktor-faktor apa saja yang menentukan semua proses diatas, dan semua aspek yang terkait pengelolaan Otonomi Daerah merupakan pokok bahasan yang sangat menarik untuk dikemukakan.

Dari semua pembelajaran diatas pada akhirnya kita bisa mengemukakan kira-kira prospek kedepan dari Otonomi Daerah akan seperti apa. Bagaimana kita mengantisipasinya agar tidak menemui kegagalan di masa depan. Tentu saja berkaitan dengan hal itu semua sejumlah rekomendasi dapat dikemukakan.

Forum yang dapat dipakai untuk membahas aspek ini bisa dilakukan pada sesi-sesi yang diatur dalam Seminar Internasional ke Sebelas ataupun dalam sesi *Round-table discussion* yang akan dilaksanakan pada akhir dari Seminar Internasional yang ke 11 ini.

Salatiga, 5 Maret 2010.
Ketua *Steering commitee* SI 11
Kutut Suwondo